

## **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

*Accountability For Village Funds Management For Corruption Prevention In  
Patampanua District, Pinrang Regency*

**Arham<sup>1</sup>, Fatimah<sup>2</sup>, Azhabu<sup>3</sup>**

Email: [arham83rockt@gmail.com](mailto:arham83rockt@gmail.com)<sup>1</sup>, [fatimahumpar11@gmail.com](mailto:fatimahumpar11@gmail.com)<sup>2</sup>, [abhuazhabu@gmail.com](mailto:abhuazhabu@gmail.com)<sup>3</sup>  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi  
Selatan Kode Pos 91131

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pengaruhnya terhadap pencegahan korupsi di Kecamatan Patampanua dan memberikan informasi secara terbuka mengenai transparansi dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa di wilayah tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah akuntabel dan bebas dari korupsi. Hal ini ditandai dengan sudah terlibatnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dana desa, kedua semua sumber daya yang digunakan baik itu manusia maupun bahan-bahan diperoleh dari desa sendiri, dan yang ketiga semua hasil kegiatan pelaksanaan dibuatkan baliho transparansi mengenai rincian dana dan ukuran dari pembangunan tersebut.

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pencegahan Korupsi.**

### **Abstract**

*This study aims to identify and analyze the accountability of village funds management and its impact on corruption prevention in Patampanua District and provide information openly about transparency and accountability to the public about village fund management in the region. The data analysis technique used in this research were descriptive qualitative.*

*The research results showed that village fund management is accountable and free from corruption. This is indicated by the involvement of the community in the implementation of village fund activities, secondly, all the resources used, both human and material, were obtained from the village itself, and thirdly, all the results of implementation activities made transparent billboards regarding the details of the funds and the size of the development.*

**Keywords: Accountability, Village Fund, Corruption Prevention.**



## PENDAHULUAN

Agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI”. Demi Terciptanya hal tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintah saat ini. Menurut permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan dan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga dengan hak otonomnya tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri. Dalam hal pengelolaan dana desa, untuk saat ini kendala umum yang dirasakan desa adalah terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB-Des) tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Hal ini disebabkan oleh sebagian besar Kepala Desa belum sepenuhnya memahami alur dari pengelolaan dana desa. Bahkan sebagian besar kepala desa ditangkap karena menyelewengkan dana desa ini. Banyaknya isu-isu yang beredar di masyarakat semakin meluas akibat banyaknya korupsi dana desa yang terjadi di desa lain, hal ini membuat adanya kekhawatiran masyarakat tentang adanya korupsi di desanya masing-masing. Pembangunan yang belum merata dan sudah lamanya jabatan perangkat desa membuat isu mengenai korupsi dana desa ini bisa terjadi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Sumber data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak terkait pengelolaan dana desa, yaitu Kepala Desa Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta Kepala Dusun sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena hanya mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, serta data berupa jurnal online. Sehingga akan terlihat jelas gambaran mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pencegahan korupsi yang ada di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

## HASIL PENELITIAN

**Tabel 1. Daftar Isi Rencana Kegiatan Pengelolaan Dana Desa**

Desa	Uraian	Realisasi anggaran
Pincara	Bidang pembangunan	Rp 676,444,500.00
	bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 102,688,000.00
	Bidang tak terduga	Rp 1,248,500.00
	silpa DDS 2018	Rp 47,227,000.00

	bunga bank 2018	Rp 4,165,334.00
	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Rp 831,773,734.00</b>
Leppangang	bidang pemerintahan desa	Rp 8,450,000.00
	bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 599,067,780.00
	bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 12,450,000.00
	bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 11,000,000.00
	Bidang tak terduga	Rp 152,507,220.00
	silpa DDS 2019	Rp 10,000,000.00
	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Rp 783,475,000.00</b>
Mattiro Ade	bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp 9,930,000.00
	bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 633,772,329.00
	bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp -
	bidang penanggulangan bencana	Rp 261,110,000.00
	silpa dds 2019	Rp 51,330,329.00
	<b>Jumlah Dana Desa</b>	<b>Rp 853,472,000.00</b>

Sumber : LPJ Dana Desa

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Patampanua berdasarkan skala prioritas. Dana desa digunakan pada beberapa bidang, yaitu bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemerintahan desa, bidang penanggulangan bencana serta bidang tak terduga. Pengelolaan dana desa dimuat dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pada pertanggungjawaban.

## PEMBAHASAAN

### 1. Perencanaan

Perencanaan dimulai dengan melakukan musyawarah serta melibatkan semua unsur masyarakat untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil musyawarah disepakati bersama dalam musyawarah tersebut.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dana desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pada tahap pelaksanaan, terdapat pelaksana teknis kegiatan yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Semua kegiatan terutama pembangunan masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengerjaan pembangunan tersebut.

### 3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan pencatatan mengenai rincian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dalam tahap penatausahaan baik penerimaan maupun pengeluaran desa, pencatatan dilakukan masih dalam bentuk

format laporan sederhana belum dalam bentuk jurnal. Adapun format yang dimaksud yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan kegiatan dilaporkan oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota setiap semester. Untuk semester pertama dilaporkan pada minggu ke empat bulan juli dan semester kedua paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berjalan berikutnya. Dalam hal pelaporan, laporan disampaikan kepada masyarakat melalui papan transparansi desa, media elektronik, dan media lainnya

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya yaitu kepada bupati/walikota setiap tahunnya. Dalam hal pertanggungjawaban pemerintah desa tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada bupati/ walikota akan tetapi juga melakukan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai semua kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

### SIMPULAN DAN SARAN

#### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa pada intinya pengelolaan dana desa di setiap desa mulai dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban adalah sama yang membedakan hanyalah proses kegiatannya saja. Ada yang lebih memprioritaskan pembangunan fisik terlebih dahulu kemudian pemberdayaan masyarakat begitupun sebaliknya.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti menyarankan:

1. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa terutama pemuda-pemuda agar pengelolaan dana desa bisa lebih akuntabel dari sebelumnya.
2. Memilih perangkat desa yang memahami alur pengelolaan dana desa pada saat pemilihan kepala desa berikutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

Arafah, Muhammad. 2016. *Pengantar Ilmu Ekonomi*.

Ardisasmita M. Syamsa, 2006. *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan, Dan Akuntabel*.

Arodhiskara, Yadi dan Ira Sahara. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*.

Arodhiskara, Yadi. 2018. *Sistem Penyusunan Anggaran Daerah*.



- Arodhiskara, Yadi, Sariana Damis, dan Sugiarti Subur, 2018. *Sistem Penatausahaan Bendahara Daerah*.
- Nurfaisal, Muhammad Dwi, Dyah Mutiarin, dan Sakir. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016, Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Univrsitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Gayatri, Made Yeni Latrini, dan whidyani. 2017. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mendorong Kemandirian masyarakat pedesaan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Denpasar
- Habibi Fikri, dan Eka Nugroho. 2018. *Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang*, Skripsi, Program Studi Administrasi Negara, Universitas Serang Raya, Banten,
- Hasniati, 2016. *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)*, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/download/1519/846>. diakses pada tanggal 3 Januari 2021.
- .Khumairah. Fatimah, 2016. *Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Patampanua Kecamatan Mario Riawa Kabupaten Soppeng*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Negeri Makassar, Makassar.
- Kurnia, Rahmi, Nurzi Sabrina, dan Halmawati. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhakl Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Makalag, Juanita Asri, Grace B Nangoi, dan Herman Karamoy. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamubagu Selatan KotaKotamubagu*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Martini, Rita, Naufal Lianto, Sukmini Hartati, Zulkifli, dan Endah Widyastuti. 2019. *Sistem Pengendalian Intern Atas Akuntabilitas Pengeloaan Keuangan Desa di Kecamatan Sembawa*, Tesis. Program Pasca Sarjana, Fakultas Ekonomi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang.
- Sirajuddin, M. Haris. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Togomulyo Kabupaten Temanggung)*, Tesis, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro, Semarang.